

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Peran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, peran dapat di artikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹ Sedangkan menurut Suhardono menjelaskan, “Peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi apabila bertentangan dapat menimbulkan suatu konflik peran, yang terjadi bila harapan-harapan yang diarahkan pada posisi yang di duduki tidak sesuai dengan semestinya”.²

Jadi peran seseorang dalam masyarakat di sesuaikan dengan kedudukan yang dimilikinya. Penjelasan di atas berusaha menjelaskan bagaimana seseorang mampu berperan dalam masyarakat hal ini tergantung kepada posisi yang dimilikinya. Terkait dengan peran Kelompok tani “Pranggang Koi Farm” di Desa Pranggang yang begitu banyak memberikan perubahan dalam sisi kehidupan masyarakat Desa Pranggang khususnya para anggota kelompok tani, dimana Kelompok tani “Pranggang Koi Farm” berusaha memberikan pengetahuan yang mandiri serta mampu memberikan solusi kepada petani koi yang

¹ <http://KKBI.web.id> diakses pada tanggal 23 maret 2017

² Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran: Konsep, Derivasi, dan implikasinya*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama hal 14

sedanga mengalami kesulitan, apa yang dilakukan oleh pihak Kelompok tani “Pranggang Koi Farm” bukan hanya untuk meraih keuntungan sepihak, akan tetapi peran yang dilakukan telah memberikan dampak positif bagi kehidupan para petani ikan di Desa Pranggang.

Brokensha dan Hogde mengatakan bahwa, “Pengembangan masyarakat adalah suatu gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi dan inisiatif dari masyarakat”. Artinya pengembangan masyarakat merupakan kegiatan yang terencana dalam membentuk dan merubah masyarakat dengan sistem partisipasi aktif dari masyarakat tersebut. Maka Kelompok tani “Pranggang Koi Farm” yang merupakan suatu lembaga dalam masyarakat dengan beberapa kegiatan yang dilakukan dan yang bertujuan untuk mensejahterakan para petani ikan di Desa Pranggang.

B. Faktor – faktor yang menentukan keberhasilan dalam implementasi pengembangan usaha tani

1. Faktor – faktor internal

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi yang baik dapat terjadi apabila aparat pelaksana kebijakan mengetahui apa yang dikerjakan.

Pengetahuan dan pemahaman pekerjaan yang akan dilakukan dapat diperoleh dengan komunikasi yang baik. Komunikasi diperlukan agar aparat pelaksana kebijakan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang dilaksanakan.

b. Sumberdaya

Sumberdaya adalah ketersediaan sumberdaya manusia berupa aparat pelaksana kebijakan dan sumberdaya lainnya yang dapat menunjang implementasi publik. Sumberdaya merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Dari hasil pengamatan sumberdaya terdiri dari ketua kelompok tani, pengurus kelompok tani dan anggota kelompok tani.

c. Disposisi (sikap pelaksana)

Disposisi atau sikap pelaksana adalah komitmen dari aparat pelaksana untuk betul-betul melaksanakan kebijakan publik, relevan dengan itu, Metter dan Hom menegaskan bahwa sikap penerimaan atau penolakan dari aparat pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

d. Struktur organisasi

Implementasi kebijakan membutuhkan dukungan struktur organisasi. Aparat birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jelas melakukan koordinasi dengan baik. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama

banyak orang. Ketika struktur organisasi tidak kondusif pada kebijakan maka akan menghambat jalannya kebijakan.

2. Faktor – faktor eksternal

a. Potensi penduduk dan sumberdaya alam

Potensi penduduk adalah potensi yang dimiliki oleh penduduk yang meliputi jumlah penduduk, tingkat pendidikan, perbandingan usia penduduk dan masalah kependudukan lainnya yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan penduduk sebagai target/sasaran dari pelaksanaan program pengembangan usaha tani. Sedangkan sumberdaya alam adalah keseluruhan sumberdaya yang tersedia dan dimiliki oleh masyarakat yang sangat diperlukan dalam menunjang pengembangan usaha tani di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten.

b. Kondisi ekonomi dan kemajuan teknologi

Kondisi ekonomi dan kemajuan teknologi yaitu kemajuan yang telah dicapai oleh masyarakat, baik dalam perbaikan tingkat hidup (ekonomi) masyarakat maupun ketersediaan sarana dan prasarana, jalan, jembatan, alat transportasi dan komunikasi. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari hasil perdagangan dari hasil usaha ikan yang dapat berpengaruh terhadap

pengembangan usaha ikan koi di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten.³

C. Kelompok Tani

1. Pengertian Kelompok Tani

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani menyebutkan bahwa kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi,geografi) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha tani anggota. Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kelompok tani pranggang koi farm merupakan kumpulan dari petani koi yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan sebagai petani koi, kesamaan lingkungan yaitu lingkungan Lereng Gunung Kelud dengan kondisi sosial, ekonomi dan geografi yang sama dan tujuan untuk mengembangkan usaha tani koi para anggotanya. Alternatif pengembangan usaha tani dapat dilakukan pada masyarakat dengan menciptakan Usaha Mikro Kecil (UMK) baik usaha tani koi, industri makanan, pengolahan hasil pertanian dan perikanan. UMK adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi.⁴

³ <http://repository.ung.ac.id> faktor – faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan pengembangan usaha tani diakses pada tanggal 29 September 2016

⁴ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*Isu-Isu Penting, (Jakarta:LP3ES, 2012), 11

Lebih lanjut Deptan merumuskan Azas kelompok tani yaitu :

a. Kesamaan kepentingan

Dasar pembentukan kelompok tani adalah kesamaan kepentingan yang diwujudkan dalam suatu tujuan kelompok. Tujuan dan cara pencapaiannya ditetapkan secara bersama-sama. Pembagian dan pendegelasan pencapaian tujuan diwujudkan dalam suatu kepengurusan kelompok yang disepakati bersama.

b. Kesamaan kawasan/hamparan usaha

Kesamaan ini akan memudahkan terjadinya komunikasi antar anggota. Intensitas komunikasi akan tinggi bila jarak dan jumlah anggota tidak besar, sehingga kekompakan kelompok dapat mudah terbentuk. Oleh karena itu jumlah anggota yang efisien antara 10 sampai dengan 25 orang.

c. Musyawarah dan mufakat

Prinsip ini merupakan fondasi dari kelompok tani dimana kepentingan setiap anggotanya diapresiasi. Segala keputusan berada di tangan para anggota yang dituangkan dalam suatu kesepakatan bersama.⁵

2. Tujuan kelompok tani

- a. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan SDM melalui pendidikan dan pelatihan dan study banding sesuai kemampuan keuangan kelompok tani tersebut.

⁵ <http://jakarta.litbang.deptan.go.id> diakses pada 16 juli 2016.

- b. Meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara keseluruhan tanpa kecuali yang terlibat dalam kepengurusan maupun hanya sebagai anggota, secara materiil maupun non material sesuai dengan kontribusi/andil/masukan yang diberikan pengembangan organisasi kelompok tani.
- c. Menyelenggarakan dan mengembangkan usaha di bidang pertanian dan jasa yang berbasis pada bidang pertanian.
- d. Dalam membangun kerjasama dengan berbagai pihak, harus diketahui dan disepakati oleh rapat anggota, dengan perencanaan dan analisa yang jelas dan harus berpedoman anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.⁶

D. Pendapatan dalam Ekonomi Islam

Distribusi pendapatan merupakan proses pembagian (sebagian hasil penjualan produk) kepada faktor-faktor produksi yang ikut dalam menentukan pendapatan. Prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan islam adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja.

Dalam ekonomi islam ditegakan suatu sistem yang adil dan merata dalam mendistribusikan pendapatan. Sistem ini tidak memberikan kebebasan dan hak atas milik pribadi secara individual dalam bidang produksi, tidak pula

⁶ margono slamet, *paradigma baru penyuluhan pertanian di era otonomi daerah* (Tesis MA, institut pertanian bogor, bogor,2001), 29

mengikat mereka dengan satu sistem pemerataan ekonomi yang seolah-olah tidak boleh memiliki kekayaan yang bebas.

Islam tidak mengatur distribusi harta kekayaan termasuk kepada semua masyarakat tidak menjadi komoditas diantara golongan orang kaya saja. Selain itu untuk mencapai pemerataan pendapatan kepada masyarakat secara obyektif. Islam menekankan perlunya membagi kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban membayar zakat, mengeluarkan infaq, serta adanya hukum waris dan wasiat serta hibah.

Usaha yang dilakukan manusia itu baik dalam bentuk fisik maupun mental dalam rangka menghasilkan produk dalam bentuk barang maupun jasa. Hasil produk ini nilainya ditukar dengan kemampuan menambah manfaat atas barang atau jasa yang sudah ada. Seseorang yang bekerja harus mendapat pendapatan yang adil sesuai dengan kondisi yang wajar dalam masyarakat. Seorang pekerja tidak boleh tidak boleh diperas tenaganya sementara pendapatan yang diterima tidak memadai. Demikian pula seorang pekerja tidak boleh dibebani pekerjaanyang terlalu berat diluar kemampuannya.⁷

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kami” (QS. Al Hasyr 7).

⁷ <http://respositori.usu.ac.id/bitstream/123456789/9904/1/10E0053.pdf> diakses tanggal 13 Juli 2016